

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian adalah Pemda di wilayah Jawa Tengah. Informan meliputi pejabat struktural/fungsional dan staf pada Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka menguji kredibilitas data, dilakukan triangulasi melalui wawancara kepada auditor eksternal pemerintah, yaitu BPK, serta wawancara kepada masyarakat yang memahami *whistleblowing*.

Penelitian dilakukan di Kantor Pemda di wilayah Jawa Tengah dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian karena kondisi Pandemi Covid-19, wawancara dilakukan secara daring dan tatap muka selama kurang lebih 45 menit.

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada informasi kualitatif dari suatu objek, kejadian ataupun aktivitas dalam suatu organisasi (Sekaran & Bougie, 2016). Nugraheni *et al.* (2021) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan percabangan penelitian kualitatif yang menganalisis fenomena secara mendalam dalam situasi kehidupan nyata. Kisworo & Shauki (2019) menjelaskan bahwa guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat bagaimana dan mengapa, metode penelitian studi kasus harus didasarkan pada sebuah teori.

Penelitian kualitatif mengeksplorasi fenomena dan menekankan pada konten dan konteks. Konten merupakan perihal yang akan diteliti sedangkan konteks merupakan obyek atau latar belakang penelitian (Nugraheni *et al.*, 2021). Dukeshire dan Thurlow dalam Sugiyono (2018) dan Nugraheni *et al.* (2021) menjelaskan penelitian kualitatif berkenaan dengan data naratif dan bukan numerik serta mencari makna dan substansi. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara, observasi, atau *focus groups* dalam mengumpulkan data. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, dan tindakan, dilakukan dengan deskripsi melalui kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah serta menggunakan metode alamiah (Moleong, 2019). Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2018) menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif yaitu: (1) dilakukan pada kondisi yang natural, (2) bersifat deskriptif, (3) menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*, (4) menganalisis data secara induktif, dan (5) lebih menekankan pada makna.

Penelitian ini dilakukan dengan eksplorasi melalui wawancara mengenai implementasi *whistleblowing* dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Stainback dalam Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang

intepretasi informan pada situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Penentuan informan dilakukan melalui *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data melalui pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2018) menjelaskan ciri-ciri khusus *purposive sampling*, yaitu: (1) *emergent sampling design*/sementara, (2) *serial selection of sample units*/menggelinding seperti bola salju (*snow ball*), (3) *continous adjustment or "focusing" of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan, (4) *selection to the point of redudancy*/dipilih sampai jenuh. Lebih lanjut, Nasution dalam Sugiyono (2018) menyatakan penentuan responden dianggap telah memadai jika telah sampai kepada taraf saturasi (datanya telah jenuh, jika ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru).

Informan penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain: (1) memiliki kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah/Pengawas Internal pada institusi lain), atau (2) memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan/peraturan atau mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi, (3) pemilihan Pemda berdasarkan adanya prestasi anti *fraud* ataupun adanya kasus *fraud* pada Pemda tersebut, (4) Pihak eksternal Pemda yang memahami *whistleblowing*.

Dalam rangka menguji validitas internal (uji kredibilitas), peneliti melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai cara, berbagai waktu, dan berbagai sumber. Triangulasi dibedakan menjadi triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu pengecekan data melalui wawancara kepada auditor eksternal pada BPK dan masyarakat yang memahami *whistleblowing*. Triangulasi sumber tidak dimaksudkan untuk mencari rata-rata, namun untuk dideskripsikan dan dikategorisasikan berdasarkan pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik dari berbagai sumber tersebut (Sugiyono, 2018).

### **3.3. Sumber Data**

Menurut Loefland dalam Moleong (2019), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata, sedangkan dokumen merupakan data tambahan. Pada penelitian ini, kata-kata dari pihak yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi *meeting online* dan proses wawancara direkam menggunakan aplikasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pejabat struktural/fungsional dan staf pelaksana pada Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan triangulasi dilakukan melalui wawancara kepada auditor eksternal pada BPK dan masyarakat yang memahami *whistleblowing*. Wawancara dilakukan kepada 12

informan yang memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan.

Wawancara dilakukan kepada:

- a. Enam orang pejabat struktural dan fungsional pada Inspektorat Daerah. Informan memenuhi kriteria sebagai APIP Daerah dan memiliki kapasitas mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi (informan 2, 5, 6, 7, dan 8).
- b. Dua orang staf dan satu orang auditor Inspektorat Daerah. Informan memenuhi kriteria sebagai APIP Daerah (informan 1, 3, dan 4).
- c. Dua orang warga masyarakat. Informan memenuhi kriteria sebagai pihak eksternal Pemda yang memahami *whistleblowing* (informan 9 dan 10).
- d. Dua orang Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Informan memenuhi kriteria sebagai auditor eksternal pemerintah (informan 11 dan 12). Rincian informan sebagai berikut:

**Tabel 4. Daftar Informan dan Waktu Pelaksanaan Wawancara**

Tanggal Pelaksanaan	Kode	Posisi Narasumber	Kriteria
27 Oktober 2021	Informan 1	Staf Inspektorat Daerah pada Kabupaten A	APIP Daerah
28 Oktober 2021	Informan 2	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Provinsi B	a. APIP Daerah b. Memiliki kewenangan mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi
28 Oktober 2021	Informan 3	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi B	a. AIP Daerah b. Memiliki kewenangan mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi
28 Oktober 2021	Informan 4	Staf Inspektorat Daerah pada Provinsi B	APIP Daerah

Tanggal Pelaksanaan	Kode	Posisi Narasumber	Kriteria
2 November 2021	Informan 5	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten C	a. APIP Daerah b. Memiliki kewenangan mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi
5 November 2021	Informan 6	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten D	a. APIP Daerah b. Memiliki kewenangan mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi
25 November 2021	Informan 7	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten E	a. APIP Daerah b. Memiliki kewenangan mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi
29 November 2021	Informan 8	Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten F	a. APIP Daerah b. Memiliki kewenangan mengusulkan kebijakan/peraturan kepada pimpinan yang lebih tinggi
27 Februari 2022	Informan 9	Masyarakat pada Kabupaten G	Pihak eksternal Pemda yang memahami <i>whistleblowing</i>
6 Maret 2022	Informan 10	Masyarakat pada Kabupaten H	Pihak eksternal Pemda yang memahami <i>whistleblowing</i>
14 Maret 2022	Informan 11	Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Auditor eksternal pemerintah
14 Maret 2022	Informan 12	Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Auditor eksternal pemerintah

### 3.4. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori institusional *work* dan institusional *logics*. Institusional *work* merupakan tindakan individual dan organisasi yang bertujuan menciptakan, memelihara, dan mendisrupsi institusi (Lawrence & Suddaby, 2006). Dalam perkembangannya, institusional *work* dibedakan menjadi *political work*, *technical work*, dan *cultural work*. Pada penelitian ini, institusional *work*, yaitu *political*, *technical*, dan *cultural work* digunakan untuk menginvestigasi komitmen

dan upaya Pemda dalam mengimplementasikan *whistleblowing* untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*.

Institusional *logics* mempelajari hubungan timbal balik antara individu, lembaga, dan organisasi dalam tatanan sosial. Prinsip utama dalam *institusional logics* adalah terintegrasinya aspek material dan aspek simbolik (Thornton & Ocasio, 2012; Kisworo & Shauki, 2019). Aspek simbolik dan aspek material pada institusional *logics* digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menginvestigasi tantangan dan peluang serta penyesuaian anggota organisasi pada implementasi *whistleblowing* dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pada Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2019) menjelaskan analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi bagian yang dapat dikelola, memadukan, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menentukan apa yang diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data melalui wawancara, peneliti melakukan analisis data sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan selama kurang lebih 45 menit dan direkam dengan persetujuan informan.

- b. Peneliti melakukan transkripsi hasil wawancara. Hasil wawancara berupa rekaman wawancara akan dikonversi dalam data tertulis.
- c. Peneliti mengamati kelengkapan transkripsi, selanjutnya menginput data transkripsi kedalam *software* data kualitatif NVivo.
- d. Setelah data transkripsi tersimpan di NVivo, peneliti melakukan *coding* menggunakan NVivo. Tujuan *coding* adalah mendapatkan kata atau frase yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai *atribute* psikologi yang muncul cukup kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Data tersebut berupa transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, jurnal, dokumen, fotografi, video, *website*, korespondensi email dan lain sebagainya. Dengan demikian *coding* merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas.
- e. Peneliti mengamati hasil *coding* dan data, kemudian mengelompokkannya kedalam tema tertentu. Pengelompokkan tema akan menghasilkan tema utama yang merupakan temuan penelitian.
- f. Peneliti menafsirkan makna tema dan deskripsi selanjutnya menggunakan teori untuk menganalisis data.

### **3.6. Instrumen Wawancara**

- a. Apakah yang menjadi motivasi dan latar belakang implementasi *whistleblowing* di organisasi anda?
- b. Bagaimana upaya advokasi, penyusunan aturan, dan penanaman budaya *whistleblowing* pada organisasi anda?

- c. Bagaimana upaya pimpinan dan anggota organisasi memelihara *whistleblowing* (dalam hal pembentukan fungsi khusus yang menangani *whistleblowing*, pelatihan, sosialisasi, dan kolaborasi dengan instansi lain)?
- d. Bagaimana ketersediaan saluran pengaduan/*whistleblowing* pada organisasi anda?
- e. Bagaimana antusiasme anggota organisasi dan masyarakat untuk menjadi *whistleblower*?
- f. Bagaimana organisasi anda merespon, menangani, dan menindaklanjuti pengaduan dari *whistleblower*?
- g. Bagaimana organisasi anda melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut?
- h. Bagaimana tantangan dan peluang implementasi *whistleblowing* pada organisasi anda?

